

Nama Kota, Tgl Bln Tahun

Nomor : .....  
Lampiran : .....  
Hal : Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik  
Dan Pedoman Perilaku Hakim oleh Hakim/Majelis Hakim  
Dalam Perkara Nomor: .....

Kepada Yth.  
Ketua Komisi Yudisial RI  
Di \_  
Jakarta

Dengan hormat,  
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : .....  
Alamat : .....  
Pekerjaan : .....  
No. Telepon : .....

Selanjutnya disebut: ----- Pelapor

Dengan ini melaporkan dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang dilakukan (*majelis hakim/hakim*) pada Pengadilan ..... (*yang memeriksa dan mengadili perkara/ yang mengeluarkan penetapan*) dengan Register Perkara Nomor: ..... tanggal (*tanggal putusan/penetapan*) dengan susunan majelis hakim sebagai berikut:

1. .... (Hakim Ketua)
2. .... (Hakim Anggota)
3. .... (Hakim Anggota)

Selanjutnya disebut: ----- Terlapor

Adapun yang menjadi dasar dan pertimbangan laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang dilakukan oleh Terlapor adalah sebagai berikut:

1. Bahwa .....(*Pelapor menyampaikan mengenai legal standing Pelapor dalam perkara yang dilaporkannya*);
2. Bahwa ..... (*Pelapor dapat menjelaskan kasus posisi yang dilaporkan*);
3. Bahwa .....(*Pelapor **wajib menyebutkan dugaan pelanggaran kode etik hakim***);
4. Bahwa.....(*Pelapor dapat menjelaskan modus dugaan pelanggaran Kode Etik Hakim*)

5. Bahwa ..... (*Pelapor dapat mengkualifikasi dugaan pelanggaran kode etik hakimnya ke dalam 10 (sepuluh) butir Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*);
6. Dst .....

Demikian laporan pengaduan ini saya buat, selanjutnya saya mohon kepada Komisi Yudisial Republik Indonesia untuk dapat memeriksa laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ini sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Hormat kami,

Nama Pelapor/kuasa Pelapor

Lampiran:

1. Fotokopi KTP/Tanda Pengenal Pelapor atau kuasanya;
2. Surat Kuasa Khusus Melapor ke Komisi Yudisial (Pelapor menggunakan kuasa);
3. Fotokopi salinan putusan/penetapan (laporan terkait dengan putusan/penetapan);
4. Bukti-bukti pendukung lain terkait laporan (rekaman audio, surat pernyataan, dll).